

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM

Putra Said Aiditya ^a

^a Magister Hukum. Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. E-mail: Putrasaiditya@gmail.com

Article	Abstract
Kata Kunci: Pemilihan Presiden; Pemilihan Umum; Sistem Demokrasi; Provinsi Jawa Tengah. Keywords: <i>Presidential election; General elections; Democratic System; Province of Central Java</i> Riwayat Artikel Received: November 1, 2023; Reviewed: December 1, 2023; Accepted: January 15, 2024; Published: January 30, 2024. DOI: 10.62263/jis.v2i1.29	Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pilar-pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang menggambarkan kekuatan suara rakyat. Provinsi Jawa Tengah, dengan populasi yang signifikan dan perannya yang krusial dalam politik nasional, memainkan peran penting dalam menentukan masa depan negara. Dalam aspek sosiologi hukum, Pilpres dan Pemilu memiliki dampak sosial, budaya, dan hukum yang signifikan dalam masyarakat. Provinsi Jawa Tengah yang geografis, etnis, agama, budaya, dan sosial yang beragam, memberikan dinamika tersendiri dalam proses politik. Pada tahun 2024, Pilpres dan Pemilu akan kembali diadakan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dampak sosial, budaya, dan hukum dari Pilpres dan Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengkaji peran faktor-faktor sosial dan budaya, serta peran lembaga hukum dalam mengatasi tantangan pemilu dan konflik pemilu, penelitian ini bermaksud mempertahankan integritas pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan politik selama dan setelah Pilpres dan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah. <i>Presidential Elections (Pilpres) and General Elections (Pemilu) are the main pillars of the Indonesian democratic system which illustrate the power of the people's vote. Central Java province, with its significant population and crucial role in national politics, plays an important role in determining the country's future. In the aspect of legal sociology, the presidential election and general elections have a significant social, cultural and legal impact on society. Central Java Province, which is geographically, ethnically, religiously, culturally and socially diverse, provides its own dynamics in the political process. In 2024, presidential elections and general elections will be held again in Indonesia, including in Central Java Province. Therefore, this research aims to understand and analyze the social, cultural and legal impacts of the 2024 presidential and general elections in the Central Java Province region. By examining the role of social and cultural factors, as well as the role of legal institutions in overcoming election challenges and election conflicts, this research aims to maintain election integrity, increase community participation, and maintain social and political stability during and after the 2024 Presidential Election and General Election in Central Java Province.</i>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat.¹ Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan dua kegiatan politik utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam penelusurannya, dengan menggunakan metode penafsiran secara tekstual dan historis, diketahui bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 digunakan untuk pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden secara bersamaan dengan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.²

Provinsi Jawa Tengah, dengan populasi yang signifikan dan peran penting dalam politik nasional, memiliki peran yang krusial dalam menentukan masa depan negara. Dalam aspek sosiologi hukum, Pilpres dan Pemilu memiliki dampak sosial, budaya, dan hukum yang signifikan dalam masyarakat. Pemilihan Presiden dan Pemilu adalah momen penting dalam mengekspresikan suara rakyat dan menentukan pemimpin serta perwakilan di tingkat nasional. Di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beragam kelompok etnis, agama, budaya, dan sosial, yang memberikan dinamika tersendiri dalam proses politik.

Dalam beberapa pemilu sebelumnya, Provinsi Jawa Tengah telah menjadi latar belakang kontroversi, ketegangan, dan tantangan hukum, seperti dugaan kecurangan pemilu dan konflik pemilu. Perbedaan politik yang kuat di antara partai politik dan calon sering kali menciptakan persaingan yang ketat, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya ketegangan selama pemilu. Ketegangan ini dapat melibatkan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, yang memerlukan intervensi aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan selama pemilu. Tantangan hukum dan konflik pemilu mungkin juga muncul akibat perbedaan pandangan dan tafsiran mengenai undang-undang pemilu, menciptakan kebutuhan untuk penafsiran hukum yang akurat dan independen oleh pengadilan, yang dapat memperlancar proses pemilu dan menjaga integritasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dokumentasi, metode ini melibatkan analisis dokumen dan literatur yang relevan, seperti undang-undang pemilu, dokumen kebijakan, laporan pemantauan pemilu sebelumnya, dan studi-studi akademis terkait pemilu di Provinsi Jawa Tengah. Ini akan membantu Anda memahami kerangka hukum yang mengatur pemilu dan faktor-faktor sosial dan budaya yang telah memengaruhi pemilihan sebelumnya.

¹ Primanda Sukma Nur Wardani, 'Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum', *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018), p. 58 <<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>>.

² Sirajul Munir, 'Pengaruh Presidential Threshold Terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden', *Journal Iuris Scientia*, 1.2 (2023), p. 65 <<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6>>.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Sosial Dan Budaya Memengaruhi Pemilih Dan Proses Politik Di Jawa Tengah

Faktor-faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilih dan proses politik di Jawa Tengah, seperti halnya dalam seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman etnis dan agama yang tinggi. Dalam pemilihan, ini dapat memengaruhi preferensi pemilihan.³ Misalnya, pemilih mungkin lebih cenderung memilih calon yang berasal dari etnis atau agama yang sama dengan mereka. Budaya Jawa memiliki peran penting dalam masyarakat Jawa Tengah. Nilai-nilai seperti kebijaksanaan, kesopanan, dan gotong royong sering kali memengaruhi cara pemilih menilai calon dan partai politik. Pemilih mungkin lebih condong memilih calon yang dianggap memiliki nilai-nilai budaya yang sejalan dengan budaya lokal. Jejaring sosial dan pengaruh keluarga dapat menjadi faktor penting dalam menentukan preferensi pemilih. Tradisi keluarga dan dukungan dari keluarga atau teman-teman dapat memengaruhi keputusan pemilih.

Tingkat pendidikan dan literasi politik pemilih juga memengaruhi bagaimana mereka berpartisipasi dalam politik. Pemilih yang lebih terdidik mungkin lebih cenderung melakukan pemilihan yang lebih berdasarkan pada isu-isu politik dan program-program calon, sementara pemilih yang kurang terdidik mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Isu-isu lokal yang memengaruhi masyarakat Jawa Tengah, seperti pertanian, kebudayaan, dan lingkungan, sering kali menjadi fokus utama dalam pemilihan di wilayah ini. Calon yang mampu mengartikulasikan pemahaman mereka tentang isu-isu lokal ini dan menawarkan solusi yang sesuai dapat memenangkan dukungan pemilih. Media, baik media sosial maupun media konvensional, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi pemilih. Pemilih mungkin mendapatkan informasi politik mereka dari berbagai sumber media, yang dapat memengaruhi pandangan mereka tentang calon dan partai politik. Dalam sosiologi politik, penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya ini berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk preferensi pemilih dan proses politik. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya ini dapat membantu partai politik dan calon dalam merancang kampanye yang efektif dan memahami kebutuhan serta aspirasi pemilih di Provinsi Jawa Tengah.

B. Dampak Hukum dari Tantangan Pemilu Seperti Dugaan Kecurangan dan Konflik Pemilu di Wilayah Ini

Dampak hukum dari tantangan pemilu, termasuk dugaan kecurangan dan konflik pemilu, dapat memiliki konsekuensi signifikan dalam konteks pemilihan di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa dampak hukum yang timbul dari tantangan pemilu, diantaranya:

³ Yana Suryana, 'Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Budaya Politik', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29.1 (2020), p. 15.

1. **Proses Hukum yang Panjang:** Dugaan kecurangan pemilu dan konflik pemilu seringkali memicu proses hukum yang panjang dan kompleks. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Proses ini dapat menghabiskan banyak waktu dan sumber daya, termasuk biaya hukum yang signifikan dan menuntut perhatian yang intensif dari pihak yang terlibat. Keberlanjutan proses hukum ini dapat menimbulkan beban finansial yang berat pada pihak-pihak yang terlibat dan memerlukan waktu yang panjang sebelum mendapatkan keputusan akhir dari pengadilan. Selain itu, kompleksitas proses hukum dapat membingungkan pemilih dan masyarakat secara umum, menghasilkan ketidakpastian dalam hasil pemilu dan memengaruhi stabilitas sosial serta politik di Provinsi Jawa Tengah.
2. **Ketidakpastian Hasil Pemilu:** Ketika ada tantangan hukum terhadap hasil pemilu, terutama jika gugatan tersebut terbukti sah, hasil pemilu dapat menjadi tidak pasti. Hal ini dapat menciptakan kebingungan di antara pemilih dan masyarakat secara umum. Ketidakpastian ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas proses pemilu dan kepercayaan mereka pada lembaga-lembaga pemilihan dan hukum. Pemilih mungkin merasa frustrasi atau skeptis terhadap hasil pemilu yang diputuskan oleh pengadilan, terutama jika proses pengadilan memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Selain itu, ketidakpastian hasil pemilu juga dapat menciptakan ketegangan politik yang lebih lanjut, dengan para pihak yang bersengketa terus memperebutkan legitimasi pemenangnya.
3. **Kerugian Hukum dan Sanksi:** Jika ada dugaan kecurangan dalam pemilu, pihak yang terlibat dalam kecurangan tersebut dapat menghadapi tindakan hukum, termasuk penyelidikan oleh aparat penegak hukum dan kemungkinan sanksi hukum, seperti denda atau hukuman penjara bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Tindakan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan integritas dan membatasi praktik-praktik yang merugikan demokrasi. Melalui penyelidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat mengungkap dugaan kecurangan, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, dan memberlakukan hukuman yang sesuai sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan hukum terhadap pelanggaran pemilu juga berfungsi sebagai *deterrent* (pemutus rantai) untuk mencegah praktik-praktik kecurangan di masa depan. Kejelasan bahwa pelanggaran hukum dalam pemilu akan menghadirkan konsekuensi hukum serius dapat mengurangi insentif untuk terlibat dalam kecurangan.
4. **Gangguan Terhadap Stabilitas Sosial:** Konflik pemilu dan ketidakpastian hasil pemilu dapat menciptakan ketegangan sosial dan politik. Ini dapat memengaruhi stabilitas sosial di Provinsi Jawa Tengah dan berpotensi berdampak negatif pada perdamaian dan ketertiban masyarakat. Mempertahankan stabilitas sosial dan politik selama dan setelah pemilu menjadi perhatian utama, dan ini mengharuskan partisipasi aktif lembaga-lembaga penegak hukum, aparat kepolisian, serta upaya rekonsiliasi dan dialog antar pihak yang bersaing. Tujuannya adalah untuk menghindari eskalasi konflik, mengurangi

ketegangan, dan memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam suasana yang relatif damai dan stabil.

5. **Peningkatan Kesadaran Hukum:** Tantangan pemilu dan konflik pemilu juga dapat meningkatkan kesadaran hukum di antara masyarakat. Masyarakat mungkin lebih sadar akan hak-hak mereka dalam konteks pemilu dan proses hukum yang dapat mereka tempuh jika merasa ada ketidakberesan.
6. **Reformasi Elektoral:** Dampak hukum dari tantangan pemilu seringkali memicu perubahan dalam sistem pemilu dan hukum pemilu. Pihak berwenang mungkin merespons tantangan ini dengan melakukan reformasi elektoral untuk meningkatkan integritas pemilu dan mencegah kecurangan di masa depan.
7. **Peran Lembaga Hukum:** Lembaga hukum, seperti pengadilan dan komisi pemilihan, memiliki peran kunci dalam menangani tantangan pemilu. Mereka harus memutuskan apakah ada bukti cukup untuk menggugurkan hasil pemilu atau memerintahkan pemilihan ulang. Keputusan lembaga-lembaga ini akan memiliki dampak signifikan pada hasil pemilu.

Dalam semua kasus, penting untuk menjaga independensi lembaga-lembaga hukum dan kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dampak hukum dari tantangan pemilu juga menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam sistem pemilu dan perlindungan hak-hak pemilih untuk memastikan proses pemilu yang demokratis dan sah. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat.⁴

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pilpres dan Pemilu Menggambarkan Interaksi Antara Hukum dan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah

Partisipasi masyarakat dalam proses Pilpres dan Pemilu di Provinsi Jawa Tengah mencerminkan interaksi yang kompleks antara hukum dan masyarakat. Hukum pemilu mengatur persyaratan pendaftaran pemilih. Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah harus memahami persyaratan ini dan mematuinya untuk memiliki hak pilih. Ini mencerminkan interaksi awal antara hukum dan masyarakat di mana masyarakat harus berinteraksi dengan prosedur hukum untuk memastikan partisipasi mereka dalam pemilu. Selama kampanye pemilu, hukum mengatur aturan-aturan yang mengontrol kampanye dan propaganda politik. Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah berinteraksi dengan hukum ini dengan menghadiri kampanye, memantau pesan kampanye, dan memahami larangan dan aturan yang berlaku untuk mendukung calon atau partai pilihan mereka.⁵

⁴ Munir Fuady, 'Sosiologi Hukum Kontemporer : Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat', (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), p. 4.

⁵ Sabhana, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum', *Jurnal Warta*, Edisi 51 (2017), 51.

Pada hari pemilihan, masyarakat berinteraksi dengan hukum ketika mereka pergi ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum pemilu. Ini mencakup verifikasi identitas, pemungutan suara yang benar, dan mengisi surat suara dengan benar. Sebagian masyarakat juga berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, yang mengharuskan mereka untuk memahami dan mematuhi aturan hukum terkait pengawasan, mencerminkan interaksi masyarakat dengan hukum dalam upaya untuk memastikan integritas pemilu dan mendeteksi potensi kecurangan. Jika ada sengketa pemilu atau keluhan terkait pelaksanaan pemilu, masyarakat dapat berinteraksi dengan hukum untuk mengajukan keluhan atau tuntutan hukum. Mencerminkan bagaimana hukum memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka dan memastikan pemilu berlangsung secara adil. Setelah pemilu selesai, masyarakat akan menilai hasilnya. Hasil pemilu tersebut mungkin memicu reaksi hukum, seperti tantangan hukum terhadap hasil pemilu jika ada dugaan kecurangan. Masyarakat dapat berinteraksi dengan hukum dalam hal ini untuk mengevaluasi hasil pemilu dan mendukung atau menentangnya melalui proses hukum. Interaksi antara hukum dan masyarakat dalam proses Pilpres dan Pemilu mencerminkan pentingnya hukum dalam memastikan pemilihan yang demokratis dan sah. Selain itu, hal ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat memiliki peran aktif dalam menjalankan hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu, serta dalam memahami dan mematuhi aturan hukum yang mengatur proses tersebut.

D. Peran Lembaga Hukum Seperti Pengadilan dan Kepolisian Dalam Menyelesaikan Sengketa dan Masalah Hukum yang Muncul Selama Pemilu

Lembaga hukum, termasuk pengadilan dan kepolisian, memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa dan masalah hukum yang muncul selama pemilu. Berikut adalah peran kunci lembaga-lembaga ini dalam konteks pemilu di Provinsi Jawa Tengah:

1. Pengadilan:

- a) **Penanganan Gugatan Pemilu:** Pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani gugatan pemilu yang diajukan oleh berbagai pihak, termasuk partai politik, calon, dan pemilih. Gugatan ini dapat mencakup dugaan kecurangan pemilu, perbedaan dalam hasil pemungutan suara, atau pelanggaran hukum pemilu lainnya. Pengadilan akan mendengarkan argumen dari semua pihak yang terlibat dan memutuskan apakah ada dasar hukum untuk menggugurkan hasil pemilu atau mengadakan pemilihan ulang.
- b) **Penegakan Hukum:** Jika terdapat pelanggaran hukum pemilu, pengadilan juga dapat berperan dalam menegakkan hukum dengan memerintahkan penyelidikan dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar hukum. Mereka dapat memerintahkan penyitaan bukti, memanggil saksi, dan menerapkan sanksi hukum jika ditemukan pelanggaran.

2. Kepolisian:

- a) **Penegakan Hukum dan Keamanan:** Kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga keamanan selama pemilu. Mereka dapat menghadapi situasi keamanan yang muncul selama pemungutan suara, termasuk potensi kerusuhan atau ketegangan. Polisi juga dapat menyelidiki dugaan pelanggaran hukum selama pemilu, seperti intimidasi pemilih atau tindakan kecurangan.
- b) **Pemantauan Pemilu:** Kepolisian sering kali terlibat dalam pemantauan pemilu, baik dalam menjaga ketertiban selama pemungutan suara maupun dalam mendeteksi potensi pelanggaran hukum pemilu. Mereka dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas pemilu untuk memastikan integritas pemilu.

3. Lembaga Pengawas Pemilu:

Pengawasan dan Pemeriksaan: Lembaga pengawas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), memiliki peran kunci dalam pemantauan pemilu dan pemeriksaan masalah hukum yang berkaitan dengan pemilu. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

4. Komite Pengawas Pemilu (Panwaslu):

Pengawasan Lokal: Komite Pengawas Pemilu (Panwaslu) merupakan lembaga yang ada di tingkat kabupaten/kota. Mereka bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan pemilu di tingkat lokal dan dapat memberikan laporan tentang masalah hukum dan pelanggaran pemilu yang mereka temukan.

Peran lembaga hukum, termasuk pengadilan, kepolisian, lembaga pengawas pemilu, dan Panwaslu, adalah penting dalam memastikan bahwa pemilu berjalan dengan integritas dan sesuai dengan hukum. Mereka memastikan bahwa sengketa dan masalah hukum yang muncul selama pemilu ditangani dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kesadaran masyarakat tentang peran lembaga-lembaga ini juga penting untuk memastikan pemilu yang adil dan sah.

KESIMPULAN

Provinsi Jawa Tengah memiliki keanekaragaman etnis, agama, dan budaya yang signifikan, yang memengaruhi preferensi pemilih dan proses politik. Nilai-nilai budaya dan jejaring sosial memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan pemilih. Tantangan pemilu, seperti dugaan kecurangan dan konflik pemilu, memunculkan dampak hukum yang signifikan. Proses hukum yang panjang, ketidakpastian hasil pemilu, dan kerugian hukum serta sanksi adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan mencerminkan interaksi yang kompleks antara hukum dan masyarakat.

Masyarakat harus mematuhi hukum pemilu, termasuk persyaratan pendaftaran pemilih, aturan kampanye, dan prosedur pemilihan. Mereka juga dapat berinteraksi dengan hukum untuk mengajukan keluhan atau tuntutan hukum jika diperlukan. Lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, lembaga pengawas pemilu, dan Panwaslu memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa dan masalah hukum selama pemilu. Mereka harus beroperasi secara independen, adil, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA /REFERENSI

- Fuady, Munir, 'Sosiologi Hukum Kontemporer : Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat', ed. by ,unir Fuady (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Munir, Sirajul, 'Pengaruh Presidential Threshold Terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden', *Journal Iuris Scientia*, 1.2 (2023) <<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6>>
- Nur Wardani, Primanda Sukma, 'Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum', *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018) <<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>>
- Sabhana, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum', *Jurnal Warta*, Edisi 51 (2017), 51
- Suryana, Yana, 'Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Budaya Politik', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29.1 (2020)